



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



RPJMD KABUPATEN
PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh di dalam menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Program-program pembangunan tersebut menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Program pembangunan merupakan penterjemahan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Pulang Pisau. Program pembangunan memiliki tujuan, sasaran, dan indikator sehingga keberhasilan suatu program pembangunan akan dapat dihitung dengan pasti. Program-program pembangunan tersebut akan dijalankan oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Program-program pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau untuk periode 2014 -2018 di dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan ditampilkan di tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah	Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana	Pengembangan sarana dan prasana wilayah	1	03	1.03.01	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65,00	75,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	03	1.03.01	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	8,00	13,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	03	1.03.01	17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	80,00	80,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	03	1.03.01	18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	65,00	79,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	03	1.03.01	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan	80,00	80,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	03	1.03.01	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	60,00	83,00	Dinas Pekerjaan Umum

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	03	1.03.01	31	Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daerah	Prasarana Umum dalam kondisi baik	80,00	90,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	07	1.07.01	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.400,00	6.201,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	07	1.07.01	17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah uji kir angkutan umum	489,00	542,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	07	1.07.01	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah terminal angkutan umum	4,00	4,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	07	1.07.01	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pemasangan rambu-rambu	0,00	205,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	25	1.07.01	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	80,00	99,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	25	1.07.01	16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: a. media massa seperti majalah, radio, dan televisi; b. media baru seperti website (media online); c. media tradisional	80,00	99,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
								seperti pertunjukan rakyat; d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau e. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho			
			1	25	1.07.01	17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase sumber daya komunikasi dan informasi yang memenuhi standar	80,00	99,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	25	1.07.01	18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang	80,00	99,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	25	1.07.01	19	Program Peningkatan Pelayanan Publik	#N/A	80,00	99,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			2	03	1.20.03	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	rasio elektrifikasi	70,00	70,00	Sekretariat Daerah
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana permukiman	Pengembangan sarana dan prasarana permukiman	1	03	1.03.01	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	- Persentase Rumah Tangga (RT) berakses air minum - Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	13,00	18,00	Dinas Pekerjaan Umum

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
		Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	1	03	1.03.01	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan infrastruktur memadai	70,00	82,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	03	1.03.01	30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	jalan lingkungan dibangun dalam kondisi baik	70,00	85,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	08	1.03.01	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	16,40	70,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	06	1.06.01	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase wilayah strategis dan cepat tumbuh yang direncanakan			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	06	1.06.01	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Menjaga kesesuaian pembangunan dengan tata ruang	Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	1	05	1.03.01	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	ada	ada	Dinas Pekerjaan Umum
			1	05	1.03.01	16	Program Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah	terlayani	terlayani	Dinas Pekerjaan Umum

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
								tentang RTR wilayah kota beserta rencana rincinya			
			1	06	1.03.01	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran	80,00	80,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	05	1.06.01	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	ada	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	13	1.13.02	23	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (wmk)	2 Jam	2 Jam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	13	1.13.02	24	Program Kedaruratan dan Logistik	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	3 Kecamatan	8 Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	13	1.13.02	25	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	cakupan rehabilitasi lingkungan	80,00	80,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga	Peningkatan Wajib Belajar	1	20	1.20.03	44	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	cakupan pengembangan IPTEK	75,00	98,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	45	Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK	cakupan pemanfaatan IPTEK	75,00	98,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	46	Program Penguatan Kelembagaan IPTEK	cakupan kelembagaan IPTEK	75,00	98,00	Sekretariat Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
Meningkatnya melek huruf di masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga	Peningkatan Angka Melek Huruf	1	01	1.01.01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	43,43	71,65	Dinas Pendidikan
			1	01	1.01.01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/SDLB/MI	88,02	95,30	Dinas Pendidikan
			1	01	1.01.01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP/MTs	65,47		Dinas Pendidikan
			1	01	1.01.01	17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA	40,86	76,94	Dinas Pendidikan
			1	01	1.01.01	18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf			Dinas Pendidikan
			1	01	1.01.01	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan	40,00	55,00	Dinas Pendidikan
			1	26	1.26.01	15	Program Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	2.617,00	12.117,00	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga	Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah	1	01	1.01.01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar	128,58	129,18	Dinas Pendidikan
			1	01	1.26.01	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	2.815,00	13.200,00	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
			1	24	1.26.01	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku	13,88	94,44	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga	Peningkatan kualitas pendidikan	1	01	1.01.01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	77,72	99,85	Dinas Pendidikan
Meningkatnya Usia harapan Hidup	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga	Peningkatan kualitas kesehatan	1	02	1.02.01	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	125,00	155,00	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	16	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rasio dokter persatuan penduduk	17,00	24,00	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,00	72,6	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita gizi kurang	5,00	22,00	Dinas Kesehatan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	02	1.02.01	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,00	72,6	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,8	1,08	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	2,00	2,00	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	70,00	95,00	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.02	16	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,00	72,6	Rumah Sakit Umum Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	02	1.02.02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	100,00	100,00	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	02	1.02.02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita gizi kurang	5,00		Rumah Sakit Umum Daerah
			1	02	1.02.02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00	100,00	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	02	1.02.02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,7	1,5	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	02	1.02.02	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Angka Harapan Hidup	71,00	72,6	Rumah Sakit Umum Daerah
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga	Peningkatan kualitas kesehatan	1	12	1.11.01	15	Program Keluarga Berencana	Persentase Akseptor KB	82,49	82,60	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	12	1.11.01	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	12,00	11,00	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	12	1.11.01	17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,00	2,00	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	12	1.11.01	23	Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber KB)	98,94	78,10	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga	Pengembangan Keterampilan Masyarakat	1	14	1.13.01	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angka Partisipasi angkatan kerja	71,00	76,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	14	1.13.01	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	0,00		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	14	1.13.01	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100,00	100,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengembangan Sektor Ekonomi	Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat	1	06	1.06.01	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	90,00	90,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	20	1.20.03	49	Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah	cakupan pemanfaatan terhadap potensi daerah	75,00	98,00	Sekretariat Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	20	1.20.03	50	Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah	cakupan sarana ekonomi dan promosi potensi daerah	75,00	98,00	Sekretariat Daerah
			2	06	2.07.01	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase komoditas perdagangan diawasi peredarannya di pasar	100,00	100,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			2	06	2.07.01	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			2	07	2.07.01	15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase industri berbasis teknologi	30,00	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			2	07	2.07.01	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Produktifitas industri kecil dan menengah	80,00	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya UMKM	Pengembangan Sektor Ekonomi	Pengembangan UMKM	1	15	2.07.01	15	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	UMKM aktif	4.353,00	4.850,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			1	15	2.07.01	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan bina UMKM	80,00	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	15	2.07.01	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM yang dibina	80,00	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya Koperasi Aktif	Pengembangan Sektor Ekonomi	Pengembangan Koperasi	1	15	2.07.01	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Aktif	106,00	175,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Menurunnya angka kemiskinan	Pengembangan Sektor Ekonomi	Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat	1	06	1.06.01	23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya	90,00	90,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	13	1.13.01	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS skala kab./kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	1.048,00	1.048,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.13.01	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS skala kab./kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1.048,00		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.13.01	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial	80,00	80,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.13.01	21	Program Pemberdayaan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial	80,00	80,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
							Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	yang memperoleh pembinaan			
			1	20	1.20.03	47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesra dan Kemasyarakatan	cakupan sarana dan prasarana kesra	75,00	98,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	48	Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah	cakupan pembinaan sarana ekonomi dan produksi daerah	75,00	98,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	51	Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat	cakupan peningkatan sosial kesra	75,00	98,00	Sekretariat Daerah
Menurunnya tingkat pengangguran	Pengembangan Sektor Ekonomi	Peningkatan pemerataan pembangunan	1	14	1.13.01	18	Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja dan K3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	8,30	7,14	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			2	08	1.13.01	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase transmigran swakarsa	20,00	20,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			2	03	1.20.03	15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase pertambangan tanpa izin	12,50	45,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya penanaman modal	Pengembangan Sektor Ekonomi	Peningkatan penanaman modal	1	16	1.06.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	10,00	15,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	20	1.20.19	41	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	rata-rata lama perizinan	1-4 hari	1-4 hari	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Berkembangnya agroindustri	Intensifikasi Komoditi	Pengembangan usaha agribisnis	2	01	2.01.01	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	cakupan teknologi tepat guna bagi petani	80,00		Dinas Pertanian dan Peternakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			2	07	2.07.01	18	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri	7,00	8,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			2	07	2.07.01	19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri	80,00	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)	Intensifikasi Komoditi	Pengembangan produktifitas pertanian	1	21	1.21.01	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama	121,70	118,67	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			1	21	1.21.01	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Beras	121,70	118,67	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			1	21	1.21.01	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Daging	2,57	2,57	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			1	21	1.21.01	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Telur	9,32	9,32	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	21	1.21.01	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ikan	33,90	33,90	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			2	01	1.21.01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	60,03	70,10	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			2	01	1.21.01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	36,05	42,25	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			2	01	1.21.01	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	cakupan teknologi tepat guna bagi petani	100,00	100,00	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			2	01	1.21.01	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan bina kelompok tani	200,00	200,00	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			2	01	2.01.01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	60,03	70,10	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				Dinas Pertanian dan Peternakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
							(Pertanian/Perkebunan)				
			2	01	2.01.01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	60,03	70,10	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas :			Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Padi (Ku/Ha)	34,50	42,25	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Jagung (Ku/Ha)	30,15	31,70	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Kedelai (Ku/Ha)	12,10	12,72	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Kacang Tanah (Ku/Ha)	11,70	11,77	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Kacang Hijau (Ku/Ha)	0,00	0,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Ubi Kayu (Ku/Ha)	11,83	118,39	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Ubi Jalar (Ku/Ha)	71,07	71,10	Dinas Pertanian dan Peternakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Buah-buahan (Ku/Ha)	1,00	11,95	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Sayur-sayuran (Ku/Ha)	50,50	55,25	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase ternak sakit yang ditangani	70,00	95,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi :			Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Sapi (ekor)	7.104,00	14.484,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Itik (ekor)		7.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Kambing (ekor)	8.883,00	14.281,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Ayam Ras (ekor)	#####	1.265.205,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Ayam Petelur (ekor)		16.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Ayam Buras (ekor)	#####	464.378,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Babi (ekor)	7.815,00	13.442,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Kerbau (ekor)	45,00	49,00	Dinas Pertanian dan Peternakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			2	01	2.01.01	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase lahan termekanisasi (%)	22,10	31,52	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	05	2.05.01	15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Produksi Perikanan	20.600,86	31.725,33	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	05	2.05.01	16	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Cakupan bina kelompok nelayan	27,16	50,19	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	05	2.05.01	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan kelompok budidaya	12,58	17,61	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	05	2.05.01	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan kelompok nelayan	87,44	82,32	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	05	2.05.01	24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Cakupan kawasan budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	80,00	80,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Intensifikasi Komoditi	Pengembangan pengelolaan sumber daya alam	1	08	1.08.01	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan	2,00	2,00	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase kerusakan kawasan hutan	0,01	0,01	Badan Lingkungan Hidup
			2	03	1.20.03	18	Program Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertambangan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	0,01	18,00	Sekretariat Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			2	03	1.20.03	20	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	cakupan pengembangan dan pemanfaatan energi	80,00	80,00	Sekretariat Daerah
			1	08	1.21.01	22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1,04	3,10	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Intensifikasi Komoditi	Peningkatkan persentase kualitas lingkungan	1	08	1.08.01	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	16,40	70,00	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	status pencemaran udara air	100,00	100,00	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan konservasi sumber daya alam	65,00	85,00	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	23	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Cakupan areal ekosistem pesisir yang dikelola dan direhabilitasi	80,00	80,00	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	80,00	80,00	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	25	Program Penataan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan	cakupan perundangan yang disusun	3,00	3,00	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	26	Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana Serta Perubahan Iklim	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	65,00	85,00	Badan Lingkungan Hidup

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	08	1.08.01	27	Program Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan	ada	ada	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	28	Program Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	cakupan pendidikan lingkungan hidup	semua kecamatan	semua kecamatan	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	29	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	50,00	70,00	Badan Lingkungan Hidup
			1	19	1.19.01	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	90,00	90,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			1	19	1.19.01	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	2 kegiatan	2 kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			1	19	1.19.01	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			2	02	2.02.01	16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1,04	3,10	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			2	02	2.02.01	20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase kerusakan kawasan hutan	0,01	0,01	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			2	02	2.02.01	21	Program Peningkatan Produksi	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	3,48	5,10	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai LAKIP	1	01	1.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Pendidikan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	02	1.02.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	03	1.03.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Pekerjaan Umum
			1	06	1.06.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	07	1.07.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	08	1.08.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Badan Lingkungan Hidup
			1	10	1.10.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	74,00	99,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase bayi berakte kelahiran	53,00	99,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	pasangan berakte nikah	83,00	99,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan KTP	55,00	99,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	25,00	90,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala propinsi	tidak ada	tidak ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan	cakupan aparatur yang dilatih	50,00	50,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	11	1.11.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	13	1.13.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.13.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	19	1.19.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	19	1.19.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			1	06	1.20.03	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data dan informasi pembangunan daerah	ada	ada	Sekretariat Daerah
			1	06	1.20.03	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran	80,00	80,00	Sekretariat Daerah
			1	06	1.20.03	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	Sekretariat Daerah
			1	09	1.20.03	17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	kasus tanah Negara yang ditindak lanjuti	90,00	90,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kinerja kepala daerah/wakil kepala daerah	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	31	Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Mass Media	cakupan kerjasama dengan mass media	ada	ada	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	32	Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Cakupan HAM	90,00	90,00	Sekretariat Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	20	1.20.03	42	Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	sistem informasi bidang hukum	ada	ada	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	43	Program Bantuan Hukum	cakupan bantuan masyarakat	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.04	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase anggota DPRD yang mematuhi tata tertib DPRD	90,00	90,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.04	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peraturan perundang-undangan harmonis dan sinkron	100,00	100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.04	37	Program Sains Driver Reference (SDR) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	cakupan program SDR	100,00	100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.04	38	Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80,00	80,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	20	1.20.06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
			1	20	1.20.06	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	persentase temuan yang ditindaklanjuti	90,00	90,00	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
							Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				
			1	20	1.20.06	21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	100,00	100,00	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
			1	20	1.20.06	22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase penerapan sistem prosedur	100,00	100,00	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
			1	20	1.20.07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			1	20	1.20.08	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kecamatan Kahayan Hilir
			1	20	1.20.09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kecamatan Kahayan Kuala
			1	20	1.20.10	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kecamatan Kahayan Tengah
			1	20	1.20.11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kecamatan Maliku
			1	20	1.20.12	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kecamatan Banama Tingang
			1	20	1.20.13	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kecamatan Pandih Batu

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	20	1.20.14	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kecamatan Jabiren Raya
			1	20	1.20.15	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kecamatan Sebangau Kuala
			1	20	1.20.16	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kelurahan Pulang Pisau
			1	20	1.20.17	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kelurahan Kalawa
			1	20	1.20.18	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kelurahan Bereng
			1	20	1.20.19	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
			1	20	1.20.20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kelurahan Bahaur Basantan
			1	21	1.21.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			1	22	1.22.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	26	1.26.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
			2	01	2.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	02	2.02.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			2	05	2.05.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	07	2.07.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Penerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Opini BPK	1	01	1.01.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Pendidikan
			1	02	1.02.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	03	1.03.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Pekerjaan Umum

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
							Capaian Kinerja dan Keuangan				
			1	06	1.06.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	07	1.07.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	08	1.08.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Badan Lingkungan Hidup
			1	10	1.10.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	11	1.11.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	13	1.13.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.13.02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	19	1.19.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			1	19	1.19.02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			1	20	1.20.03	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.04	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.05	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	20	1.20.05	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	cakupan penatausahaan keuangan daerah	100,00	100,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	20	1.20.05	18	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	peningkatan penerimaan pendapatan	13,00	13,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	20	1.20.05	19	Program Peningkatan dan Pengembangan Aset serta Barang Milik Daerah	cakupan aset yang dikelola	80,00	80,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	20	1.20.06	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
			1	20	1.20.07	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			1	20	1.20.08	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kecamatan Kahayan Hilir
			1	20	1.20.09	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kecamatan Kahayan Kuala
			1	20	1.20.10	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kecamatan Kahayan Tengah
			1	20	1.20.11	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kecamatan Maliku
			1	20	1.20.12	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kecamatan Banama Tingang
			1	20	1.20.13	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kecamatan Pandih Batu

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	20	1.20.16	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kelurahan Pulang Pisau
			1	20	1.20.17	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kelurahan Kalawa
			1	20	1.20.19	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
			1	21	1.21.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			1	22	1.22.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	26	1.26.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
			2	01	2.01.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	02	2.02.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Perkebunan dan Kehutanan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
							Capaian Kinerja dan Keuangan				
			2	05	2.05.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	07	2.07.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah	Penerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah	1	01	1.01.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Pendidikan
			1	01	1.01.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Pendidikan
			1	01	1.01.01	04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	Dinas Pendidikan
			1	01	1.01.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Pendidikan
			1	02	1.02.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	Dinas Kesehatan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	02	1.02.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	02	1.02.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	03	1.03.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Pekerjaan Umum
			1	03	1.03.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Pekerjaan Umum
			1	03	1.03.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Pekerjaan Umum
			1	06	1.06.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	06	1.06.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	06	1.06.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	07	1.07.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	07	1.07.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	07	1.07.01	04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	07	1.07.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	08	1.08.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Badan Lingkungan Hidup
			1	10	1.10.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	11	1.11.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	11	1.11.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	13	1.13.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.13.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.13.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.13.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	13	1.13.02	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	13	1.13.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	19	1.19.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			1	19	1.19.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			1	19	1.19.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	19	1.19.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			1	19	1.19.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			1	20	1.20.03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	33	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur	persentase pengembangan pendayagunaan aparatur	90,00	90,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	34	Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan	cakupan pembinaan/pengawasan tata pemerintahan	90,00	90,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	35	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan	cakupan pelayanan kesra	1 kabupaten	1 kabupaten	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.04	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.04	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Sekretariat Dewan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
											Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.04	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	20	1.20.05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	20	1.20.06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
			1	20	1.20.06	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
			1	20	1.20.06	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
			1	20	1.20.06	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
			1	20	1.20.07	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			1	20	1.20.07	28	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal	70,00	85,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
								dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya			
			1	20	1.20.07	29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah	Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya	70,00	85,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			1	20	1.20.07	30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir	80,00	80,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			1	20	1.20.08	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kecamatan Kahayan Hilir
			1	20	1.20.08	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kecamatan Kahayan Hilir
			1	20	1.20.09	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kecamatan Kahayan Kuala
			1	20	1.20.09	04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	Kecamatan Kahayan Kuala
			1	20	1.20.09	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kecamatan Kahayan Kuala
			1	20	1.20.10	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kecamatan Kahayan Tengah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	20	1.20.10	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kecamatan Kahayan Tengah
			1	20	1.20.11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kecamatan Maluku
			1	20	1.20.11	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kecamatan Maluku
			1	20	1.20.12	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kecamatan Banama Tingang
			1	20	1.20.12	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kecamatan Banama Tingang
			1	20	1.20.13	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kecamatan Pandih Batu
			1	20	1.20.13	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kecamatan Pandih Batu
			1	20	1.20.14	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kecamatan Jabiren Raya
			1	20	1.20.14	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kecamatan Jabiren Raya
			1	20	1.20.15	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kecamatan Sebangau Kuala

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	20	1.20.15	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	Kecamatan Sebangau Kuala
			1	20	1.20.15	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kecamatan Sebangau Kuala
			1	20	1.20.16	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kelurahan Pulang Pisau
			1	20	1.20.17	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kelurahan Kalawa
			1	20	1.20.18	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kelurahan Bereng
			1	20	1.20.19	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
			1	20	1.20.19	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
			1	20	1.20.19	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
			1	20	1.20.20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kelurahan Bahaur Basantan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	21	1.21.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			1	22	1.22.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	22	1.22.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	22	1.22.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	26	1.26.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
			1	26	1.26.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
			1	26	1.26.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
			2	01	2.01.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Pertanian dan Peternakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			2	01	2.01.01	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	02	2.02.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			2	02	2.02.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			2	02	2.02.01	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			2	02	2.02.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			2	05	2.05.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	05	2.05.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	05	2.05.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	07	2.07.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
											Mikro, Kecil dan Menengah
			2	07	2.07.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			2	07	2.07.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama	Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan	1	19	1.19.02	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,29	2,40	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			1	18	1.20.03	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	40,00	45,00	Sekretariat Daerah
			1	18	1.20.03	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah Orgasnisasi olahraga	15,00	20,00	Sekretariat Daerah
			1	18	1.20.03	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Gedung Olahraga	1,00	2,00	Sekretariat Daerah
			1	22	1.22.01	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga	80,00	80,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
								Pemberdayaan Masyarakat (LPM)			
			1	22	1.22.01	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	60,00	90,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	22	1.22.01	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase LPM yang berprestasi	100,00	100,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	22	1.22.01	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparaturnya pemerintah desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	80,00	80,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	22	1.22.01	19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	PKK aktif	0,00	8,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	22	1.22.01	20	Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L)	cakupan PM2L	80,00	80,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	22	1.22.01	21	Program Fasilitas Pembangunan Desa Terpadu	cakupan pembangunan desa terpadu	semua kecamatan	semua kecamatan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan	Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama	Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan	1	11	1.11.01	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,00	6,50	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	11	1.11.01	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	95,00	93,50	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	11	1.11.01	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,05	0,05	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	11	1.11.01	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,00	6,50	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	11	1.11.01	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	95,00		Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kesetaraan gender	Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama	Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan	1	01	1.01.01	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Dinas Pendidikan
			1	08	1.08.01	07	Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Badan Lingkungan Hidup
			1	20	1.20.09	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kecamatan Kahayan Kuala
			1	20	1.20.10	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kecamatan Kahayan Tengah
			1	20	1.20.11	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kecamatan Maliku

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	20	1.20.12	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kecamatan Banama Tingang
			1	20	1.20.13	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kecamatan Pandih Batu
			1	20	1.20.14	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kecamatan Jabiren Raya
			1	20	1.20.15	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kecamatan Sebangau Kuala
			1	20	1.20.19	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
			1	26	1.26.01	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
			2	07	2.07.01	07	Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal	Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama	Pengembangan pelestarian adat dan budaya lokal	1	19	1.19.02	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penegakan PERDA	65,00	95,00	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			1	17	1.20.03	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4,00	4,00	Sekretariat Daerah
			2	04	1.20.03	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisata	0,00	1,37	Sekretariat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Setiap program pemerintahan daerah tidak dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika tidak disusun dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Oleh karena itu, program pemerintahan daerah yang disusun dalam RKPD harus konsisten dengan program, indikator kinerja outcome dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang RPJMD.